



Ajukan Skema PSBB DIY Belum Perlu

Tetap Disiapkan Jika Ada Lonjakan Pemudik

YOGYA (KR) - Pemda DIY belum akan mengajukan skema status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait

dampak kasus virus Korona (Covid-19) kepada Pemerintah Pusat. Alasannya, DIY belum memenuhi persyaratan status

PSBB tersebut yaitu data peningkatan jumlah kasus menurut waktu dengan menyertakan kurva epidemiologi, penyebaran

kasus menurut waktu dan kejadian transmisi lokal.

"Rapat tadi, kabupaten/kota dan Forum Komunikasi Pimpin-

an Daerah (Forkopimda) di DIY sepakat belum waktunya kita menyampaikan PSBB. Tetapi saya tetap mempersiapkan ka-

lau ada lonjakan pemudik saja," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X

*** Bersambung hal 8 kol 5**

DIY

Sambungan halaman 1

usai memimpin Rapat Forkopimda DIY di Gedhong Pracimosono Kapatihan, Rabu (8/4).

Sekda DIY Drs K Baskara Aji mengungkapkan, ada ketentuan dalam PSBB yang belum terpenuhi dalam kondisi sekarang. Kendati demikian Pemda DIY tetap akan melihat perkembangan atau eskalasinya terlebih dahulu. Seandainya terjadi peningkatan jumlah kasus, tidak menutup kemungkinan akan diadakan per-

temuan kembali, untuk membahas apakah PSBB perlu dilakukan atau tidak.

"Kalau ada peningkatan kasus kami akan bertemu lagi untuk melakukan pembahasan apakah PSBB harus dilakukan atau tidak. Kalau pun kita memaksakan unsur PSBB kalau belum memenuhi persyaratan Kemenkes juga tidak akan memberikan rekomendasi," jelas Baskara Aji.

Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyampaikan wilayah Kota Yogyakarta untuk PSBB ini mempunyai beberapa persyaratan seperti epidemiologis, persebarannya dan lain sebagainya. Dari persyaratan PSBB tersebut, Pemkot Yogyakarta belum melaksanakan skema tersebut.

"Kami belum perlu dilaksanakannya PSBB di wilayah Kota Yogyakarta. Rata-rata Bupati sama, sehingga kesimpulannya belum perlu menerapkan skema PSBB di wilayahnya masing-masing, tetapi petanya kan belum" ujar Haryadi.

Haryadi menuturkan masih ada yang perlu dikaji, di antaranya belum ada peta penyebarannya. Sehingga pihaknya belum menetapkan skema tersebut. Namun manakala persyaratan PSBB ter-

penuhi maka baru akan mengajukan skema tersebut. "Kita belum masuk dan memenuhi kriteria tersebut," imbuhnya.

Senada, Bupati Sleman Sri Purnomo menegaskan Sleman masih mempertahankan status tanggap darurat Covid-19 sehingga belum perlu menerapkan skema PSBB. Pihaknya justru lebih menekankan agar masyarakat bersama dengan Pemkab guna mengkondisikan wilayahnya dengan menjaga jarak.

"Pengajuan PSBB ada di Bapak Gubernur, dari Sleman kita belum. Kita lebih memfokuskan pada jaga jarak agar betul-betul dilaksanakan dan setiap keluar memenuhi arahan Presiden dengan selalu menggunakan masker," tandasnya.

Sri Purnomo menambahkan Pemkab Sleman lebih mempertegas dan meminta tim kesehatan agar hasil tes laboratorium Pasien Dalam Pengawasan (PDP) segera didapatkan.

"Selama ini kan sudah meninggal ternyata sudah 1 minggu lebih belum tahu positif apa negatifnya. Kalau sejak awal diketahui kita langkahnya pasti. Masyarakat juga kita arahkan dan sebagainya," tambahnya.

(Ira/Ria) -g

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perhubungan			

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005